

Penerapan Interoperabilitas Sistem Elektronik untuk Satu Data Indonesia

DIREKTORAT LAYANAN APLIKASI INFORMATIKA PEMERINTAHAN
DITJEN. APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



SATU DATA
INDONESIA



BADAN PUSAT STATISTIK



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL



KEMKOMINFO



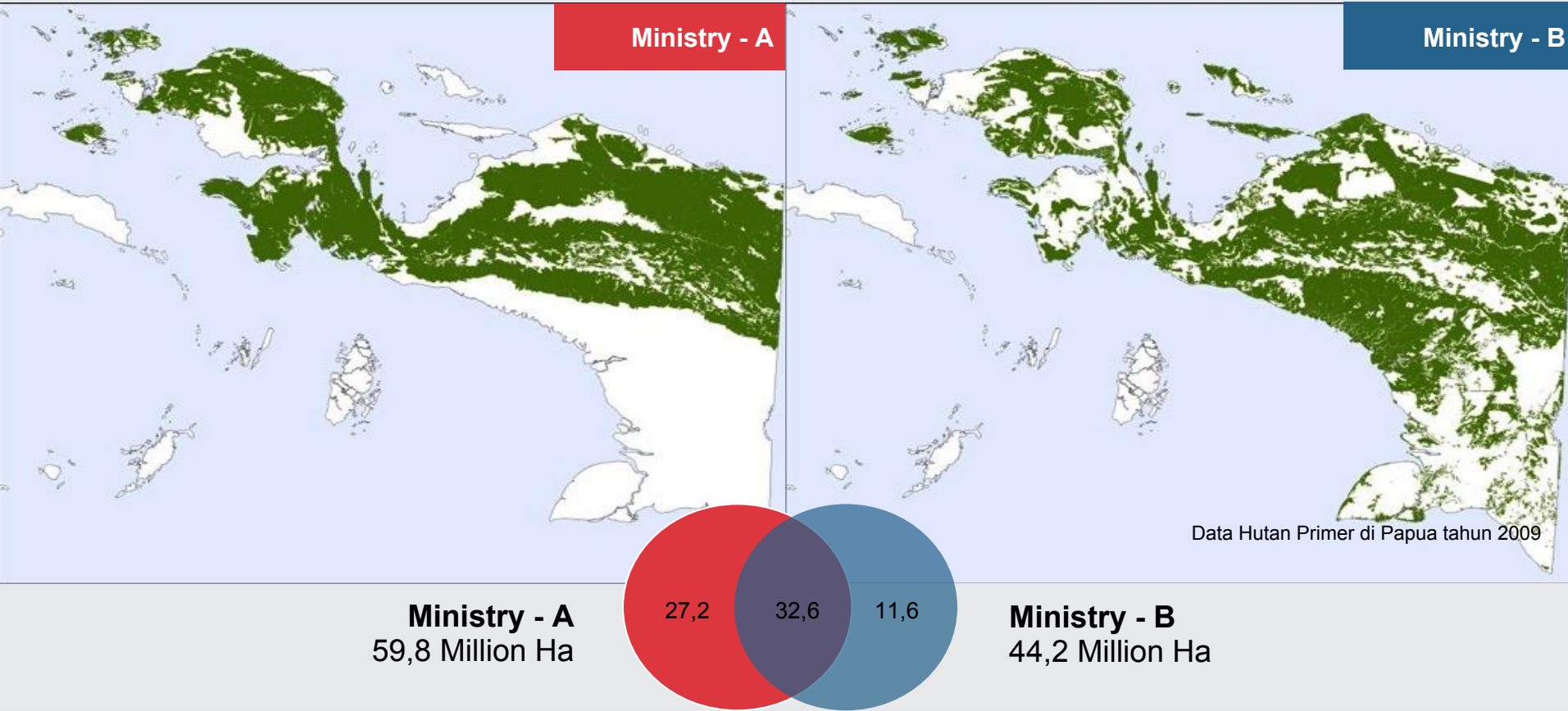


DATA

ADA DIMANA -MANA
NAMUN KETIKA DICARI,

TIDAK ADA
DIMANA-MANA

Permasalahan Integritas Data untuk Pengambilan Kebijakan



Permasalahan Integritas Data untuk Pengambilan Kebijakan (2)

KEMENTERIAN - A
15 K Kapal



KEMENTERIAN - B
640 K Kapal

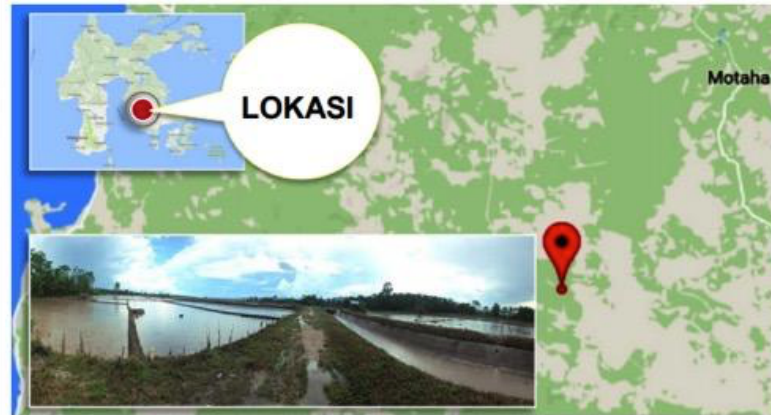
ABSENNYA DEFISINI/METADATA

- Kementerian Perhubungan hanya melakukan pendataan pada kapal berukuran >7 GT, dimana KKP turut mengukur kapal <7GT
- Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mendata kapal yang tidak memiliki gross akta, dimana hal tersebut menjadi syarat kapal yang terdata pada Kemenhub

ABSENNYA KODE REFERENSI

- Tidak terjadinya mekanise sinkronisasi pada data kapal kedua kementerian yang saling beririsan akibat tidak adanya kode referensi tunggal yang lazim dipakai untuk menyelaraskan dua database

Permasalahan Pemanfaatan Data



Irigasi Lambandia di Kab. Kolaka Timur, Sulteng (progress fisik: 100%)
4°18'54.8"S 121°58'15 »E

MASALAH:

Tidak ada peta pemanfaat irigasi

No proper planning before undertaking
development programmes/projects: Dams and
irrigation were built without geo-spatial map.



Irigasi Koak Aweng di NTB (progress fisik: 100%)
4°18'54.8"S 121°58'15"E

MASALAH:

Waduk yang dibangun sangat besar, sedangkan daerah
irigasi hanya terdiri dari beberapa petak sawah (kurang
dari 10 x 15 meter)

Unmatched demand and supply:
The dam was built only for few small-sized
rice fields.

PRINSIP-PRINSIP SATU DATA INDONESIA



SATU STANDAR DATA

Standar yang mengatur **metodologi** yang meliputi **konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan** dan **asumsi**



SATU METADATA BAKU

Informasi terstruktur yang berfungsi untuk menjelaskan **isi dan sumber data** sehingga dapat mudah untuk **ditemukan, digunakan, atau dikelola kembali**



INTEROPERABILITAS

Kemampuan Data untuk **dipertukarkan** atau **dibagipakaikan** antarsistem yang saling berinteraksi



REFERENSI DATA

Data yang dihasilkan harus menggunakan **Kode Referensi** dan **Data Induk** yang tersedia di Portal Satu Data

STRATEGI IMPLEMENTASI SATU DATA INDONESIA



PERBAIKAN TATA KELOLA DATA

- Penataan **regulasi dan kelembagaan**
- **Forum Satu Data Indonesia.** Standardisasi & sinkronisasi data, serta Memastikan interoperabilitas data lintas K/L/D
- **Peningkatan Kapasitas**



RILIS & PEMANFAATAN DATA TERBUKA

- Publikasi data dalam **format terbuka**
- Pengembangan portal Satu Data Indonesia (**data.go.id**)
- Mendorong **pemanfaatan data** baik internal maupun publik

RANCANGAN PERPRES SDI VERSI KE-18

Versi 30 Oktober 2017

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
SATU DATA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

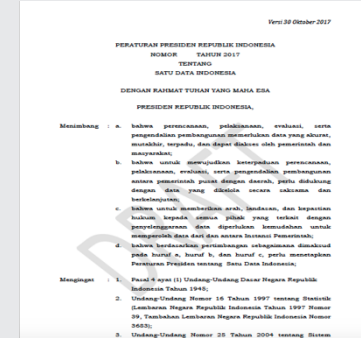
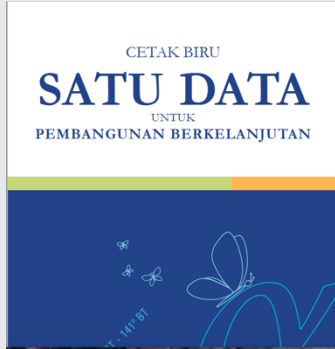
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan memerlukan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat diakses oleh pemerintah dan masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan antara pemerintah pusat dengan daerah, perlu didukung dengan data yang dikelola secara saknawa dan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan data diperlukan kemudahan untuk memperoleh data dari dan antara Instansi Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

SUBSTANSI RANCANGAN PERPRES

1. Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Pemerintah
2. Kualitas/Integritas Data yang Diselenggarakan oleh Pemerintah
3. Bagipakai/Interoperabilitas Data Pemerintah
4. Mekanisme Forum Satu Data
5. Memperkuat peran Walidata (Pusdatin/Diskominfo) menjadi satu-satunya pintu keluar masuk data instansi pemerintah

Rancangan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia



2016 - Maret 2017

Mei 2017

November 2017

Januari 2018

Mei- September 2018

Iterasi tim
penyusun dan
KL pelopor

Iterasi
K/L/D/I

Iterasi
Publik

Finalisasi
&
Pengajuan
Ke Setneg

Izin
Prakarsa

PAK dan
Harmonisasi

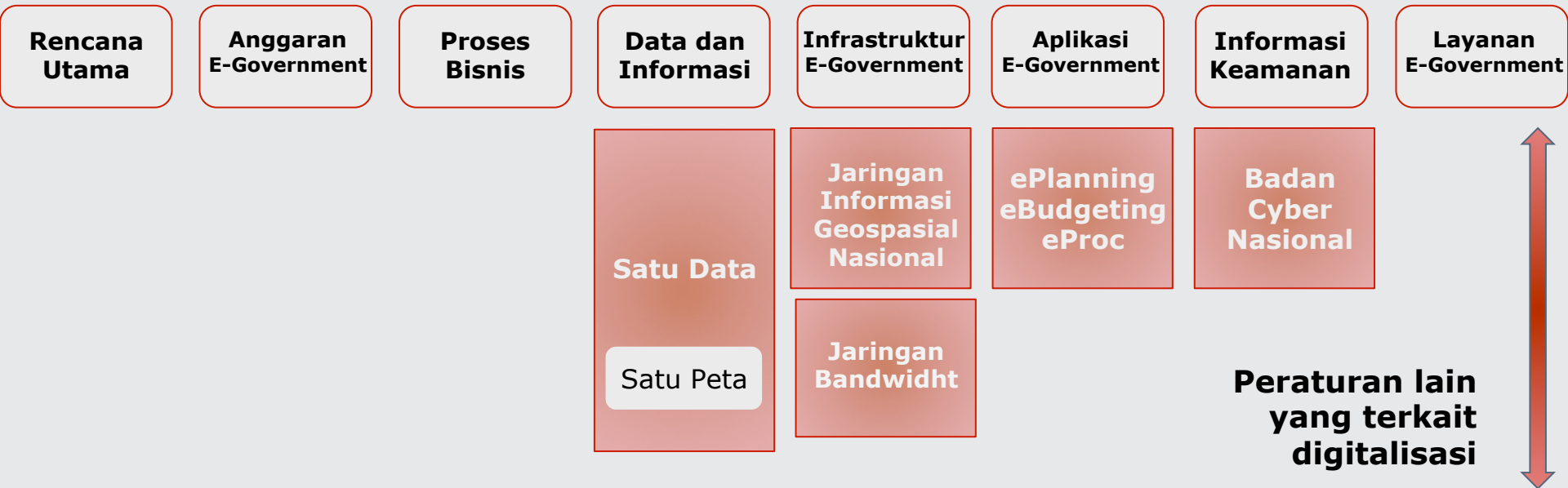
Forum antar kementerian

Forum Konsultasi Publik

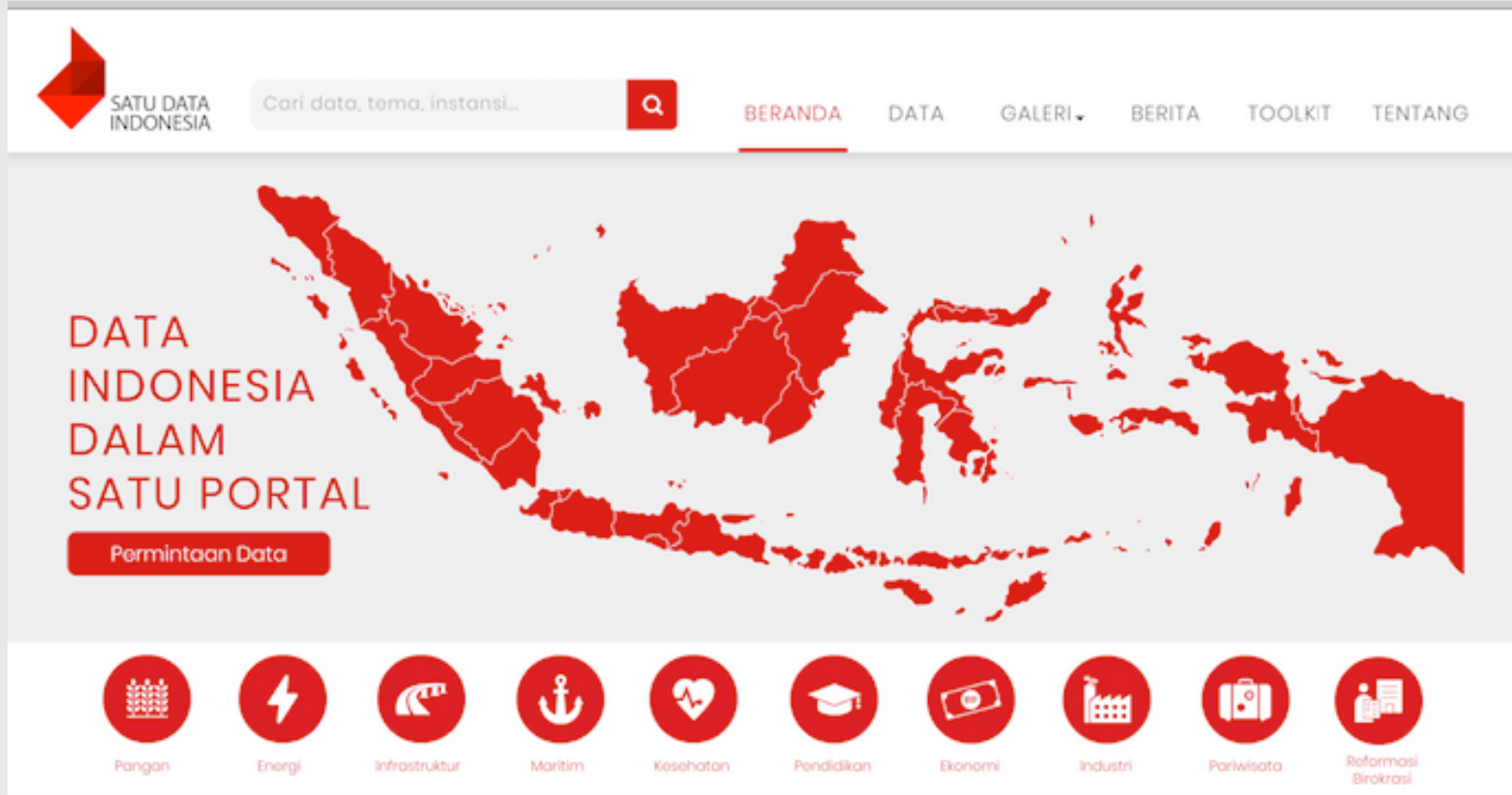
Forum Konsultasi Online



SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK



PORTAL SATU DATA INDONESIA VERSI 3.0, data.go.id



PUBLIKASI DATA DALAM FORMAT DATA TERBUKA

APA ITU DATA TERBUKA?

Data Terbuka adalah data yang dapat digunakan secara **bebas**, **dimanfaatkan**, dan **didistribusikan kembali** oleh **siapa pun** tanpa syarat kecuali dengan persyaratan memberikan atribusi kepada si pemilik data.



data.go.id



OPEN
GOVERNMENT
INDONESIA

LEGAL

- Data dirilis sesuai dengan **ketentuan peraturan perundang-undangan**
- Data **bebas biaya**
- Data dengan lisensi terbuka (i.e.: **CC-BY**)

TEKNIS

- Data dirilis dalam format dapat digunakan kembali (**reusable**) dan mudah dibaca mesin (**machine-readable**)

Format Data yang Dibagi-pakaikan

KONDISI SAAT INI



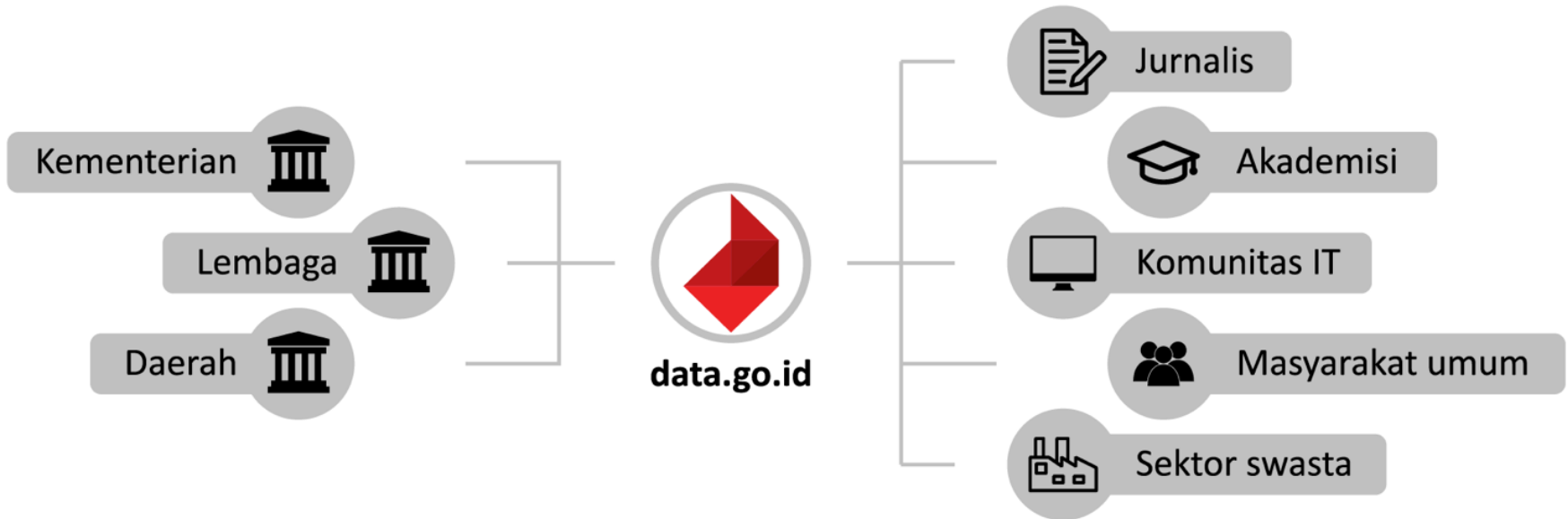
Materi Cetak Non Digital dan Materi Digital yang Sulit Digunakan Kembali

SATU DATA INDONESIA

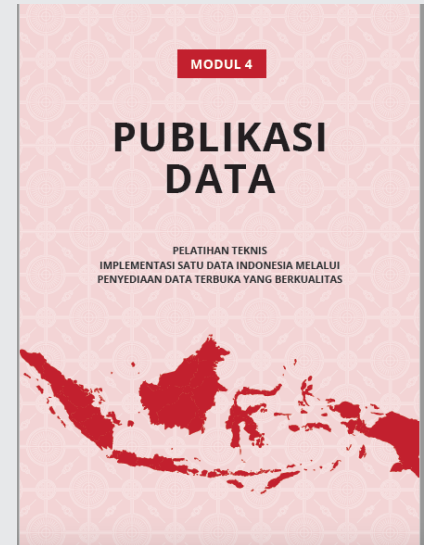
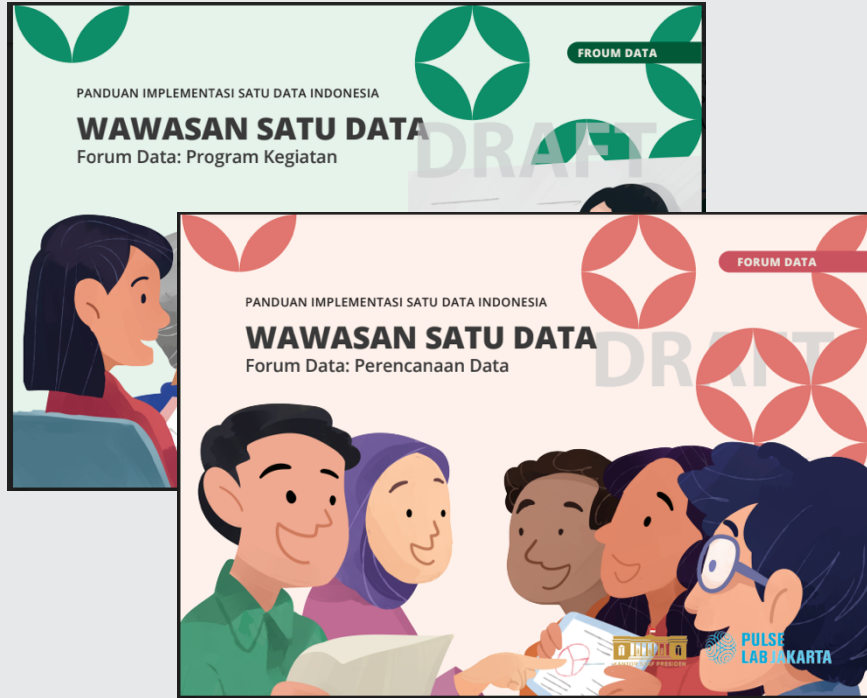


Materi Digital yang terstruktur, mudah dibagipakaikan antar pengguna dan mudah digunakan Kembali

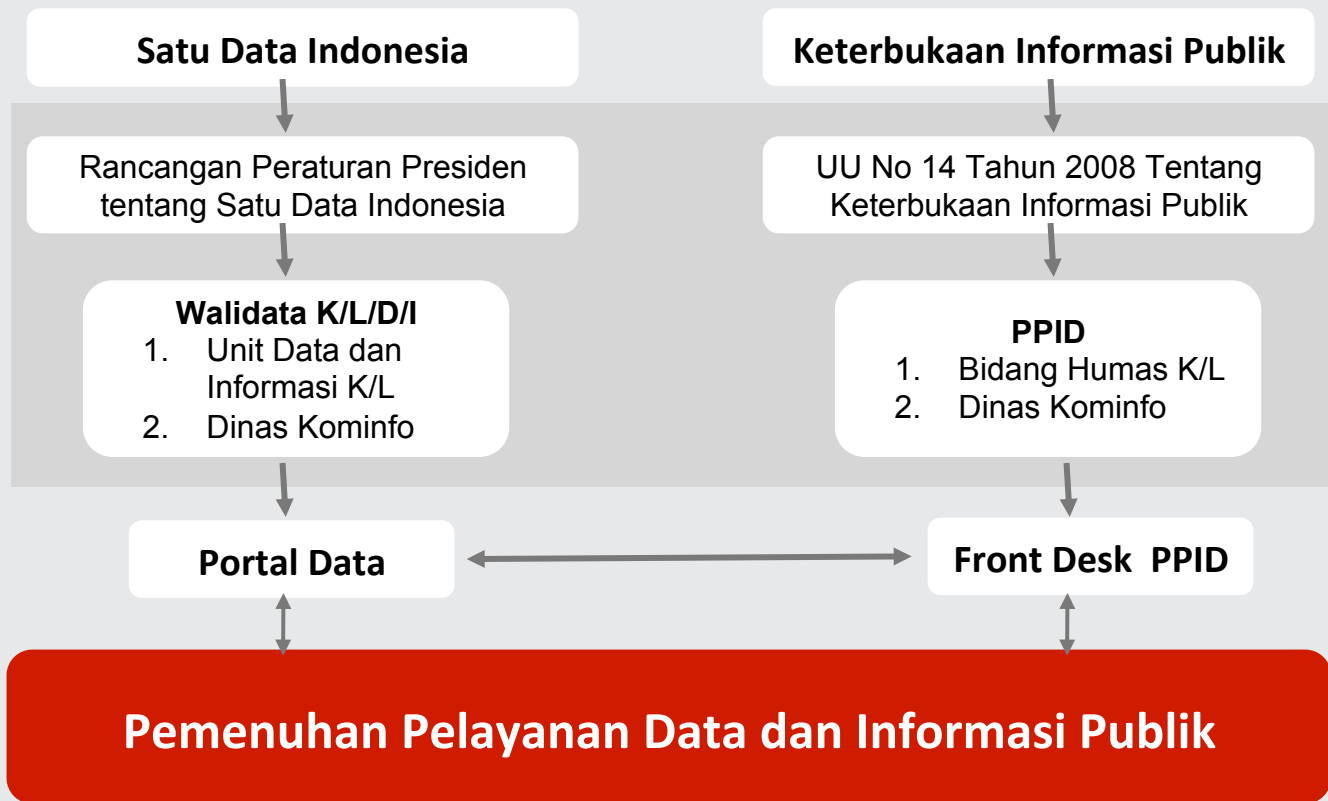
PEMANFAATAN DATA PEMERINTAH



Petunjuk Teknis Implementasi Satu Data Indonesia

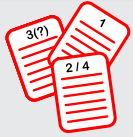


Sinergi Satu Data Indonesia dengan Keterbukaan Informasi Publik

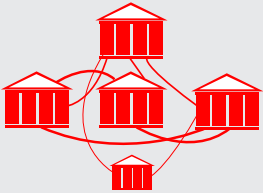


Mewujudkan Pengambilan Kebijakan berlandaskan Data

Existing Conditions



Scattered Data



Lack of Institutional Coordination



Unstandarized Data

Current Steps



Structuring Regulation and Institution



Providing Open Government Data

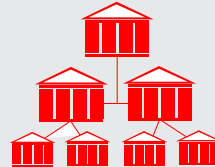


Conducting Forum Data and Pilot Project

Ideal Conditions



Integrated Government Data
(*National Data Warehouse*)



Structured Coordination among Institutions



Open Government Data

Future



Big Data for Real Time Government Decision Support

FGD Implementasi Pertama, 30 Juli 2018

1. Penyamaan Pemahaman Istilah teknis Implementasi SDI
2. Pemaparan dan review Versi-1 Bisnis proses Implementasi SDI
3. Diskusi potensi tantangan dan hambatan dalam Implementasi SDI



FGD Implementasi Kedua, 28 Agustus 2018

Review Bisnis Proses Implementasi SDI versi kedua

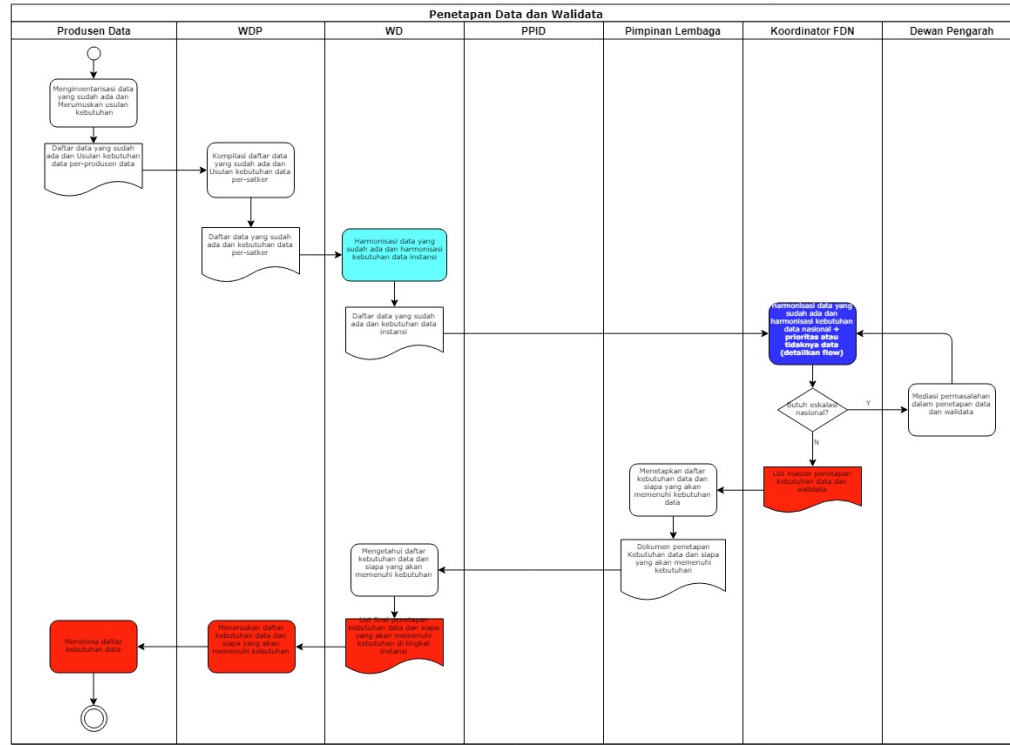
- a. Penyusunan Bisnis Proses Penentuan Data Prioritas
- b. Penentuan awal tagging *sistem informasi* dan keterkaitannya dalam implementasi SDI.
- c. Perumusan Fitur Utama Portal Satu Data Indonesia.

Flow Chart V2 – Bisnis Proses Satu Data Indonesia

Penentuan Data dan Walidata

Legenda

Portal Satu Data Indonesia
Sistem Pengolahan Data Instansi
Portal Pengolahan Metadata
Forum Data Internal
Forum Data Nasional
Manual / tanpa SI
Portal Data Instansi
MANTRA

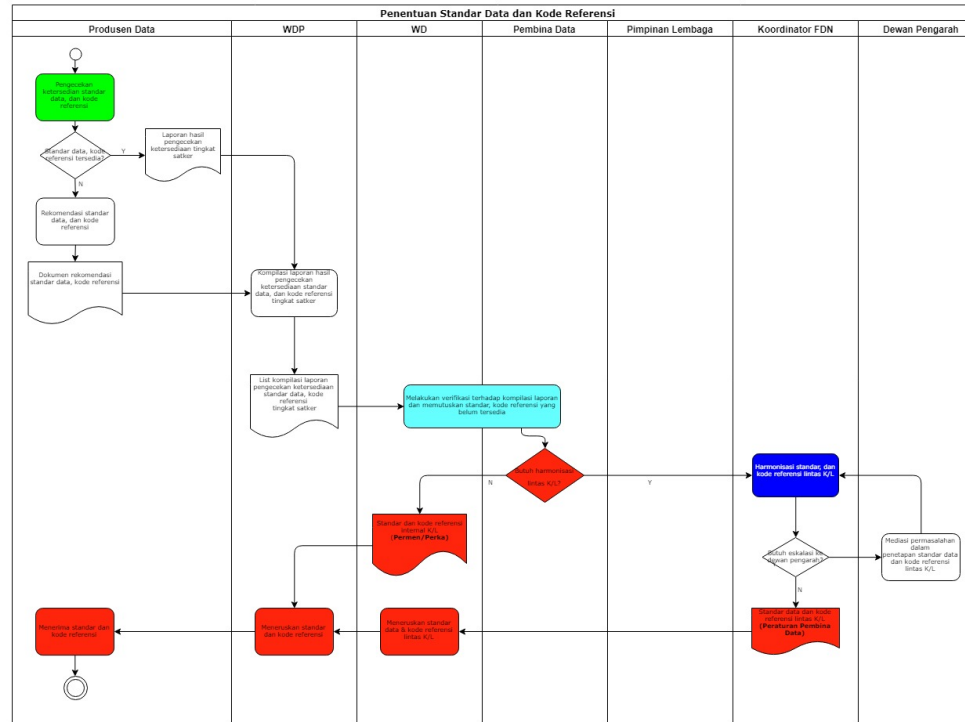


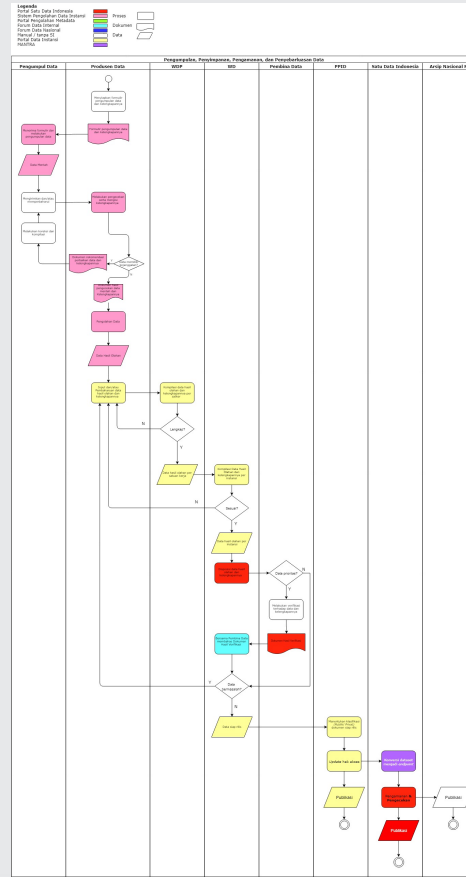
Flow Chart V2 – Bisnis Proses Satu Data Indonesia

Penentuan Standar Data dan Kode Referensi

Legenda

Portal Satu Data Indonesia
Sistem Pengolahan Data Instansi
Portal Pengolahan Metadata
Forum Data Internal
Forum Data Nasional
Manual / tanpa ST
Portal Data Instansi
MANTRA





TERMAKASIH



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL



KEMKOMINFO